

# IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI DESA RETOK KECAMATAN RETOK B

Oleh:  
**ABIGAIL ROTUA MEIRODA SIBARANI**  
NIM. E21112001

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas  
Tanjungpura Pontianak Tahun 2017  
Email: [abigailsibarani@gmail.com](mailto:abigailsibarani@gmail.com)

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai Implementasi Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Desa Retok Kecamatan Kuala Mandor B. Dengan fokus penelitian mengenai proses implementasi program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di Desa Retok Kecamatan Kuala Mandor B. Permasalahan yang menyangkut Program PKK, yang terjadi di Desa Retok ini cukup menarik untuk diteliti mengingat masih ada masyarakat yang belum ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan Program PKK. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dikaitkan dengan teori yang dikemukakan oleh Lineberry, yaitu Pembentukan unit organisasi atau staff pelaksana; Penjabaran tujuan kedalam berbagai aturan pelaksana (*Standard Operating System/SOP*); Koordinasi berbagai sumber dan pengeluaran pada kelompok sasaran serta pembagian tugas diantara badan pelaksana; Pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Sudah terbentuknya PKK di Desa Retok Kecamatan Kuala Mandor B dan terlaksana dengan mengikuti pelaksanaan Program PKK terdahulu dan disesuaikan dengan perkembangan PKK saat ini; 2). Pelaksanaan Program PKK sudah mengacu pada SOP untuk mengatur setiap kegiatan secara efektif; 3). Koordinasi berada pada ketua PKK Desa Retok dan masing-masing ketua kelompok kerja (pokja), serta pembagian tugas terorganisir sesuai bidang dari kesepuluh (10) Program PKK; 4). Pencapaian tujuan menyangkut Program PKK terletak pada berbagai sumber yang ada di Desa Retok sudah dialokasikan dan didistribusikan dengan adil.

Kata-kata kunci: Implementasi Kebijakan, Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

## THE IMPLEMENTATION OF FAMILY WELFARE AND EMPOWERMENT PROGRAM IN RETOK VILLAGE KUALA MANDOR B SUB-DISTRICT

### Abstract

This research aims at providing insights regarding an implementation of family empowerment and welfare in Retok, Kuala Mandor B sub-district with an emphasis is placed on its implementation process. Issues related to Family Welfare and Empowerment Program (so-called PKK) in Retok village are intriguing to study since some society members have not participated yet in events initiated by PKK. This research was qualitative in nature and employed a descriptive study design. It used Lineberry's theory which covered the establishment of organizational units or executive staffs, the description of objectives in forms of Standard Operating System (SOP), the coordination of various resources and expenditures in the target group as well as task divisions of the executing agencies. Finally, it also included the distributions of resources to achieve goals. Result of the discussion revealed that. 1). PKK had existed in Retok Village in which its execution referred to program made by previous PKK. In practice, the implementation was adapted with the development of the current PKK. 2). Second, the implementation of PKK events had followed the SOP to ensure that every events was carried out effectively. 3). Next, the coordination was given to the head of PKK in Retok Village and the chairpersons of the executing agencies. In addition, it was reported that the task divisions had been organized well and were in line with 10 main Programs of PKK. 4). Finally, the objective achievement of PKK Programs were based on various resources in retok village which had been distributed equally.

*Key words: Policy Implementation, Family Welfare and Empowerment Program (PKK).*

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat, banyak berkembang organisasi masyarakat yang didalamnya bertujuan untuk memberdayakan individu-individu agar dapat menjadi panutan di tengah masyarakat dan dapat mengarahkan dirinya sendiri menjadi pribadi yang mandiri dan berwawasan luas. Dimulai dari awal pergerakan perempuan di Indonesia dibuka oleh pikiran seorang ibu Kartini. Kegiatan Kartini pada awalnya menekankan pada pendidikan yang membuka cakrawala untuk kaum perempuan, dan Kartini juga memberikan pula kesadaran yang belakangan disebut sebagai “emansipasi wanita”, bahwa kaum perempuan sederajat dengan kaum laki-laki. Banyak sekali pemikiran modern yang hadir dari sosok Kartini. Salah satu pemikiran Kartini adalah masalah kesetaraan gender di bidang pendidikan.

Salah satu wadah organisasi perempuan di masyarakat adalah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). PKK sebagai mitra kerja pemerintah sekaligus merupakan organisasi kemasyarakatan yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkatan. PKK mempunyai peran untuk membantu pemerintah Desa dan Kelurahan dalam meningkatkan kesejahteraan lahir batin menuju terwujudnya keluarga yang berbudaya,

bahagia, sejahtera, maju, mandiri, dan harmonis serta mempunyai peran dalam menumbuhkembangkan potensi dan peran perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Selain itu, peran PKK juga sebagai penggali, pengembang potensi masyarakat khususnya keluarga, pembina, motivator, serta penggerak prakarsa, gotong royong, dan swadaya perempuan dalam pembangunan sebagai bagian internal dalam mewujudkan pembangunan partisipatif.

Pada tahun 2013, diterbitkan PERMENDAGRI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan PKK, pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 *point* nomor 5: Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, selanjutnya disingkat Gerakan PKK adalah gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Hal mendasar yang diatur dalam Permendagri tersebut adalah: a. Pembinaan dan pengawasan terhadap Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan PKK ada di Institusi yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat; b. Sebutan Dewan Penyantun menjadi Pembina sehingga Menteri Dalam Negeri menjadi Ketua Pembina TP PKK

Pusat, Gubernur Ketua Pembina TP PKK Provinsi sampai dengan Kepala Desa/Lurah sebagai Ketua Pembina di wilayahnya masing-masing.

Pemberdayaan Keluarga adalah segala upaya bimbingan dan pembinaan agar keluarga dapat hidup sehat sejahtera, maju dan mandiri. Prinsip Gerakan PKK adalah pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Sifat Gerakan PKK adalah universal dan independen, maka penyelenggaraannya perlu dilandasi dengan peraturan perundang-undangan. Pemberdayaan masyarakat melalui gerakan PKK merupakan upaya memandirikan masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Kesejahteraan keluarga menjadi tujuan utama PKK. Hal ini dikarenakan keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang akan berpengaruh besar terhadap kinerja pembangunan. Dari keluarga yang sejahtera ini, maka tata kehidupan berbangsa dan bernegara akan dapat melahirkan ketentraman, keamanan, keharmonisan, dan kedamaian. Dengan demikian, kesejahteraan keluarga menjadi salah satu tolak ukur dan barometer dalam pembangunan. Oleh karena itu, sesuai amanat Permendagri Nomor 5 Tahun 2007, PKK merupakan salah satu

Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dan merupakan mitra pemerintah dan program kemasyarakatan. Untuk mencapai tujuan Gerakan PKK dalam pelaksanaannya di lapangan perlu adanya dukungan dan peningkatan koordinasi dengan Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK di semua jenjang dan dengan lembaga lain.

Gerakan PKK sebagai bentuk partisipasi masyarakat telah cukup lama bergerak dan mengisi pembangunan melalui 10 Program PKK, yang dibagi kedalam 4 kelompok kerja (pokja), yaitu pelaksanaan program dan kegiatan PKK secara terpadu dilaksanakan dengan berpedoman pada 10 Program Pokok PKK. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah untuk meningkatkan pengetahuan ibu rumah tangga dari kesepuluh program kerja, yaitu pada Pokja I di bidang penghayatan dan pengamalan Pancasila dan gotong royong; Pokja II di bidang pendidikan dan keterampilan dan bidang pengembangan kehidupan berkoperasi; Pokja III di bidang pangan, sandang, perumahan dan tatalaksana rumah tangga; Pokja IV di bidang kesehatan, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat.

Sasaran gerakan PKK adalah keluarga, baik di perdesaan maupun perkotaan yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan kemampuan dan kepribadiannya, dalam bidang: mental spiritual meliputi sikap dan perilaku sebagai insan hamba Tuhan, anggota masyarakat dan warga Negara yang

dinamis serta bermanfaat, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Fisik material meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, kesempatan kerja yang layak serta lingkungan hidup yang sehat dan lestari melalui peningkatan pendidikan, pengetahuan dan keterampilan.

Untuk dapat membina keluarga secara langsung dan menjangkau sasaran sebanyak mungkin, dibentuk Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), yang mekanisme gerakannya dikelola dan dilaksanakan oleh Tim Penggerak Pemberdayaan (TP PKK) dan Kesejahteraan Keluarga di setiap jenjang. Peran aktif segenap lapisan masyarakat dalam pembangunan harus lebih ditingkatkan, merata dan berkualitas dalam memikul beban dan tanggung jawab pembangunan, maupun dalam menikmati hasil pembangunan itu sendiri. Kelompok Dasa Wisma adalah kelompok yang berada dibawah Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan, Dasa Wisma terdiri dari 10-20 rumah tangga atau sesuai dengan situasi dan kondisi daerah setempat, dengan susunan keanggotaan seorang ketua dan sekretaris yang dipilih sebagai kelompok potensial terdepan dalam pelaksanaan program PKK.

Dalam era globalisasi persaingan untuk maju sangat ketat. Gerakan PKK dituntut untuk menumbuhkembangkan sikap dan perilaku, kemandirian pribadi, keluarga dan

masyarakat, agar tidak keliru dalam menerima globalisasi. Tantangan yang dihadapi antara lain perkembangan sumber daya manusia, pergeseran tata nilai, pemanfaatan sumber daya alam, ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan tatanan Internasional dan penanganan manajemen pemerintahan dan pembangunan Nasional yang dipengaruhi oleh berbagai faktor terkait. Untuk itu perlu adanya ketahanan keluarga dalam upaya mewujudkan keluarga sejahtera. Peran PKK dalam melaksanakan programnya mempunyai kebijakan, strategi yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam upaya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga.

Pada pelaksanaannya, ternyata masih belum berjalan sesuai harapan, terdapat kurangnya dukungan dari keluarga untuk ikut serta dalam kegiatan PKK, ini karena dari sebagian keluarga masih merasa bahwa kegiatan tersebut tidak begitu penting, apalagi jika dilihat dari beberapa keseharian ibu rumah tangga biasanya hanya bekerja dirumah untuk melayani suami serta anak-anaknya yang dianggap lebih penting. Di sisi lain bagi beberapa rumah tangga yang mencari nafkah dengan membuka warung, ataupun kesibukan berladang milik sendiri, sehingga ada kendala bagi ibu-ibu PKK untuk tergerak menghadiri pertemuan/kegiatan PKK.

Kelemahan dari permasalahan yang dihadapi dan yang secara nyata berpengaruh

terhadap proses kegiatan. Dilihat dari Sumber Daya Manusia (SDM) baik yang menjadi kelompok sasaran PKK maupun para pengelolanya; Koordinasi dengan instansi terkait belum optimal; Fungsi dan program PKK yang belum dipahami masyarakat secara merata; Sistem Informasi Manajemen PKK dan sarana penunjangnya belum merata. Ancaman yang dihadapi ialah; Pengaruh globalisasi dalam kehidupan keluarga dan masyarakat; Pesatnya arus informasi yang terkadang tidak selalu sesuai dengan kepribadian bangsa dan tata nilai yang berlaku di masyarakat; Pendapatan keluarga yang relatif masih rendah, menyebabkan kurang terpenuhinya kebutuhan dasar keluarga, sehingga produktifitas kerja rendah; Keadaan geografis dan jarak jangkauan antar wilayah menyebabkan kurang lancarnya komunikasi dan informasi yang diperlukan di segala aspek kehidupan.

Dalam pelaksanaannya secara umum, diharapkan dapat memberikan pedoman pelaksanaan program kerja, arah kebijakan dan strategi peningkatan kemandirian Gerakan PKK dalam keluarga dan masyarakat dilingkungannya melalui pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan 10 Program Pokok PKK. Kegiatan tersebut perlu melakukan upaya pemahaman kesadaran pentingnya pangan yang bergizi, berimbang, beragam dan berkualitas, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga yang sehat melalui lomba-lomba dan

kajian. Pelaksanaan program PKK diharapkan dapat secara merata dilaksanakan disemua jenjang, yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh, dan mengetahui bagaimana Implementasi Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Retok Kecamatan Kuala Mandor B. Keberhasilan dari 10 Program Pokok PKK terwujud karena gerakan ini dimunculkan dari kebutuhan masyarakat dan hasil yang didapat juga dapat dinikmati atau ditujukan langsung untuk masyarakat sendiri menuju terwujudnya keluarga yang sejahtera. Hal ini yang melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul "Implementasi Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Desa Retok, Kecamatan Kuala Mandor B."

## **2. Fokus Penelitian**

Berpijak pada latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka penelitian ini difokuskan pada proses Implementasi Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Retok Kecamatan Kuala Mandor B.

## **3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fokus penelitian, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses Implementasi Program

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Retok Kecamatan Kuala Mandor B, dapat berjalan dan terlaksana sesuai harapan.

#### 4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana proses Implementasi Program PKK di Desa Retok Kecamatan Kuala Mandor B.

## B. KAJIAN TEORI

Pada dasarnya kebijakan merupakan suatu rangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Kebijakan merupakan suatu hasil analisis yang mendalam terhadap berbagai alternatif yang bermuara kepada keputusan tentang alternatif terbaik.

Definisi kebijakan publik, secara konseptual kebijakan publik dapat dilihat dari Kamus Administrasi Publik Chandler dan Piano dalam **Pasolong** (2014:38), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. Bahkan Chandler dan Piano beranggapan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk investasi yang kontinu oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya

dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pemerintah.

R. Dye dalam **Pasolong** (2014:39), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah “apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”. Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (objektifnya) dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.

Pakar Inggris, W.I Jenkins dalam **Abdul Wahab** (2014:15), merumuskan kebijakan publik sebagai berikut: “*A set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where these decisions should, in principle, be within the power of these actors to achieve*” (serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut).

Pakar Prancis, Lemieux dalam **Abdul Wahab** (2014:15), merumuskan kebijakan publik sebagai berikut: “*The product of activities aimed at the resolution of public problems in the environment by political actors whose relationship are structured.*

*The entire process evolves over time*" (produk aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah publik yang terjadi di lingkungan tertentu yang dilakukan oleh aktor-aktor politik yang hubungannya terstruktur. Keseluruhan proses aktivitas itu berlangsung sepanjang waktu).

Definisi kebijakan publik diatas dapat dikatakan bahwa: (1) Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah, (2) Kebijakan publik harus berorientasi kepada kepentingan publik, dan (3) Kebijakan publik adalah tindakan pemilihan alternatif untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah demi kepentingan publik. Jadi, idealnya suatu kebijakan publik adalah (1) kebijakan publik untuk dilaksanakan dalam bentuk rill, bukan untuk sekedar dinyatakan, (2) kebijakan publik untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan karena didasarkan pada kepentingan publik itu sendiri.

### C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan analisis data secara kualitatif, yaitu suatu

jenis penelitian yang bermaksud memberikan gambaran dari suatu kejadian atau temuan-temuan data dan gejala-gejala yang terjadi berdasarkan fakta yang tampak atau dengan apa yang ada saat penelitian ini

dilakukan. Pemilihan metode ini bertujuan untuk memperoleh gambaran keadaan dan data yang holistik atau menyeluruh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan lebih jelas.

Berdasarkan pengertian di atas, maka penelitian ini adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat objek serta menganalisa kebenarannya berdasarkan data yang di peroleh. Dalam rangka mendapatkan data secara komprehensif, peneliti terjun langsung ke lapangan agar dapat mengamati secara langsung objek yang diteliti.

### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi merupakan suatu keputusan untuk mencapai sasaran tertentu, maka untuk merealisasikan pencapaian sasaran tersebut diperlukan serangkaian aktivitas pelaksanaannya. Mengingat bahwa implementasi suatu program merupakan suatu hal yang kompleks karena banyaknya faktor yang saling mempengaruhi dan terkait, maka untuk memahami adanya perbedaan antara apa yang diharapkan tercapai dengan yang terjadi kemudian menimbulkan kesadaran mengenai pentingnya studi-studi implementasi.

Untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, ada langkah pilihan yaitu mengimplementasikan dalam bentuk

program atau melalui formulasi kebijakan atau turunan dari kebijakan publik itu sendiri. Dengan kata lain, implementasi kebijakan publik merupakan upaya untuk merealisasikan suatu keputusan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses implementasi kebijakan akan berjalan dengan baik jika telah ada kejelasan mengenai siapa-siapa saja pelaksanaan yang ditunjukkan untuk menjelaskan semua dari proses implementasi suatu kebijakan.

Berkenaan dengan informasi dan masalah yang ditemukan mengenai hal yang berkaitan dengan Program PKK serta bagaimana upaya penyelesaian atau solusi untuk mengatasi masalahnya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga di setiap rumah tangga. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Kepala Desa Retok Kecamatan Kuala Mandor B menegaskan bahwa jalannya Program PKK di Desa Retok sudah mendapatkan informasi yang harus diketahui oleh semua masyarakat mengenai adanya Program PKK di desa, agar masyarakat mengetahui apa maksud dan tujuan PKK khususnya untuk Desa Retok, dan upaya untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dilapangan, serta lebih mengupayakan bagaimana solusinya agar proses Implementasi Program PKK tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.

## 1. Pembentukan Unit Organisasi

Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah bagi orang-orang untuk berkumpul, bekerjasama secara rasional dan sistematis, terencana, terpimpin dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya (uang, material, mesin, metode, lingkungan), sarana, prasarana, data, dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi.

Salah satu wadah organisasi perempuan dimasyarakat yang ada di Desa Retok Kecamatan Kuala Mandor B ialah PKK yang berupaya membantu masyarakat untuk sejahtera dan mandiri. PKK Desa mempunyai tugas untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang ada dalam sepuluh (10) Program PKK dibidangnya masing-masing untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Tim Penggerak PKK berada ditingkatkan pusat sampai dengan Desa/Kelurahan. PKK dikelola dan digerakkan oleh Tim Penggerak PKK yang diketuai oleh istri Pimpinan Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Kepala Desa/Lurah), secara fungsional. Dapat dikemukakan bahwa kunci berkembangnya program dan kegiatan PKK justru ada peran nyata diwujudkan oleh istri Pimpinan Daerah.

Tatacara pembentukan pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteran Keluarga (TP PKK), melalui calon pengurus TP PKK diusulkan oleh pemuka-pemuka

masyarakat desa yang bersangkutan. Pemilihan pengurus TP PKK dilakukan secara musyawarah dalam rapat yang diselenggarakan khusus dan dipimpin oleh Kepala Desa. Rapat khusus dihadiri oleh pemuka-pemuka masyarakat desa yang bersangkutan. Nama pengurus yang terpilih dalam rapat khususnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Setelah itu, masa bhakti pengurus TP PKK ditetapkan 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal penetapan dan dapat dipilih kembali setelah masa bhaktinya habis. Untuk lebih meningkatkan peran serta wanita dalam pembangunan sampai tingkat bawah, TP PKK membentuk PKK kelompok RW, RT dan Dasawisma, kelompok-kelompok tersebut telah ditetapkan dan dilakukan oleh TP PKK dengan Surat Keputusan sebagai PKK kelompok RW, kelompok RT dan Dasawisma.

Pembentukan Unit Organisasi PKK yang biasa di sebut dengan PKK Desa Retok Kecamatan Kuala Mandor B, sudah ada sejak dulu. PKK Desa hanya mengikuti system yang sudah ada secara turun-temurun dibentuk dan dilaksanakan di desa. Berdasarkan sejarah singkat Gerakan PKK, PKK sudah ada dan bermula dari *Seminar Economic* di Bogor pada tahun 1957, yang menghasilkan rumusan 10 Segi Kehidupan Keluarga. Hasil kesepakatan Rakernaslub PKK tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan

Keluarga (PKK). Dengan dasar Kepmendagri tersebut disusunlah Pedoman Umum Gerakan PKK sebagai panduan pelaksanaan Gerakan PKK, sampai saat ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Retok, Bapak Sahidin SH, sebagai salah satu informan diketahui bahwa, untuk mengetahui bagaimana pembentukan unit organisasi dan pelaksanaan Program PKK di Desa Retok, serta mengenai program kerja dan keikutsertaan Bapak Kepala Desa yang berkaitan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga, khususnya pada pokja III, yaitu:

*“Untuk pembentukan unit organisasi dan pelaksanaannya kita lakukan melalui forum rapat umum dengan tidak mengenyampingkan pendapat dari Tim Penggerak PKK Desa”* Ada program kerja saya yang berkaitan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga, khususnya pada pokja III, misalnya ikut kelompok budidaya itik, kelompok budidaya ikan lele dan nila, kelompok budidaya babi unggul, karena ini juga salah satu kegiatan yang menyangkut bidang pangan pada pokja III. Upayanya dengan memberi motivasi lewat forum, bahkan kita langsung memberi contoh berupa awasi langsung dan tentunya memberi bantuan bibit sayuran lewat PKK desa untuk setiap rumah tangga. (wawancara 30 juni 2016).

Mengacu pada hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Retok Kecamatan Kuala Mandor B, telah diketahui

bahwa program PKK khususnya pada pokja III tersebut juga menyangkut program kerja kepala desa yang turut bekerja maupun membantu setiap rencana dan kegiatan PKK desa khususnya pada pokja III, salah satunya dibidang pangan. Telah diketahui bahwa pada awalnya pembentukan PKK di Desa Retok tidak muncul begitu saja, dengan diadakannya forum rapat umum terlebih dahulu yang kemudian disetujui oleh semua pihak terutama aparat kemasyarakatan dan pemerintahan yang bertugas di desa, serta mendukung adanya Program PKK di desa.

Berdasarkan hasil penelitian dilihat bahwa, dalam mengimplementasikan suatu kebijakan terhadap pelaksanaan program PKK yang ada di Desa Retok memiliki panduan, baik teknis yang menjadi dasar untuk menjalankan suatu aturan yang ada terhadap program PKK di Desa Retok demi kelangsungan kesejahteraan di setiap keluarga atau tiap rumah tangga. Dikaitkan dengan elemen pertama dari teori yang dikemukakan oleh Lineberry ialah Pembentukan unit organisasi atau staff pelaksana merupakan hal yang paling perlu dilakukan dalam mengimplemantasikan suatu kebijakan publik, karena tanpa adanya penentuan yang jelas terhadap unit organisasi dan staff pelaksana yang ada di Desa Retok, maka pada kebijakannya tidak dapat berjalan dengan semestinya.

## **2. Penjabaran Tujuan (Standard Operating Prosedures)**

Standar operasional prosedur merupakan tatacara atau tahapan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu. Dimana fungsi SOP ini yaitu memperlancar tugas pegawai, sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan, mengetahui dengan jelas hambatan-hambatannya dan mudah dilacak, mengarahkan pegawai untuk disiplin kerja serta pedoman dalam melaksanakan tugasnya.

Pedoman kebijakan adalah peran dan manfaat utama dalam SOP (*Standard Operating Prosedures*). SOP pasti didukung oleh berbagai kebijakan, dimana kebijakan dalam organisasi merupakan sumber dan pembuatan SOP. Kebijakan yang dimasukkan dalam SOP adalah kebijakan yang sudah terperinci dan akan bermanfaat bagi organisasi. Dalam menjalankan SOP, diharapkan memperoleh manfaat untuk mengendalikan dan mengevaluasi jalannya kegiatan-kegiatan dalam organisasi. SOP pasti didukung oleh berbagai kebijakan, dimana kebijakan dalam organisasi merupakan sumber dan pembuatan SOP. Sebagai pedoman kegiatan, SOP dapat mengatur kegiatan-kegiatan secara efektif. Jadi, SOP sangat penting bagi organisasi untuk tetap membuat kebijakan-kebijakan organisasi layak terap dan mencapai manfaat optimal.

Dalam penelitian ke Desa Retok Kecamatan Kuala Mandor B, peneliti ikut serta dan melihat bagaimana kegiatan PKK

di Desa Retok. Ternyata banyak kegiatan yang baik dan bermanfaat untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga, misalnya mengajak anggota TP PKK untuk ikut menanam tanaman obat rumahan yang berkhasiat dan bermanfaat sebagai pertolongan pertama untuk anggota keluarga di setiap rumah tangga jika terkena gatal-gatal ataupun demam. Mengajak setiap rumah tangga untuk menanam tanaman obat yang bisa dan mudah tanam di sekitar pekarangan rumah, seperti menanam jahe, kunyit, lengkuas, temu lawak, mengkudu, belimbing wuluh, tanaman lidah buaya, daun jarak, daun beluntas, daun sirih, bunga dewa-dewi, dan kumis kucing. Tanaman obat tersebut yang dihimbau oleh Ibu Kepala Desa kepada seluruh rumah tangga di Desa Retok, agar dapat digunakan jika ada salah satu anggota keluarga yang sakit, dengan mengolah tanaman obat tersebut sebagai pertolongan pertama sebelum pergi ke puskesmas terdekat. Namun hal ini tidak sepenuhnya terlaksana di setiap pekarangan rumah tangga Desa Retok, karena ada rumah tangga yang tidak memiliki pekarangan yang luas dan juga ada rumah tangga yang sengaja tidak menanam tanaman obat tersebut, karena merasa mampu untuk pergi berobat langsung ke puskesmas terdekat.

Berdasarkan informasi dan hasil wawancara yang dikemukakan oleh Bapak Kepala Desa Retok mengenai pelaksanaan Program PKK di Desa Retok apakah sudah sesuai dengan SOP yang ada atau ada

aktifitas yang menyimpang dari SOP yang ada dan upaya untuk menegaskan agar sesuai dengan SOP yang ada, dari hasil wawancara dengan bapak Kepala Desa, yaitu

*“Program PKK di Desa Retok sudah mengacu pada SOP, tapi untuk pelaksanaan sepenuhnya masih belum sesuai harapan, karena ada beberapa faktor yang menghambat untuk kegiatan PKK berlangsung. Kemudian untuk aktifitas yang menyimpang dari SOP itu tidak ada, sebab apabila menyimpang dari SOP maka program tidak akan tercapai. Upayanya memiliki beberapa cara, misalnya dengan mengadakan bimbingan teknis/pelatihan, sosialisasi, praktek langsung.”*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa PKK desa sudah memiliki SOP yang menyangkut mengenai pelaksanaan Program PKK desa dan apabila ada aktifitas menyimpang dari SOP di desa maka akan menindaklanjuti setiap keluhan atau permasalahan yang disampaikan masyarakat, kemudian dilaksanakan sesuai dengan kebijakan SOP yang ada.

SOP digunakan untuk menilai apakah pekerjaan tersebut sudah dilakukan dengan baik atau tidak. Dengan beberapa cara yang bisa diupayakan melalui diadakannya bimbingan teknis/pelatihan kepada masyarakat, sosialisasi yang terus dilakukan agar masyarakat mengerti dan paham dengan berbagaimaksud dan tujuan, khususnya dari organisasi PKK desa, yang kemudian

praktek secara langsung kelapangan atau bertemu masyarakat secara langsung.

Kesimpulan yang diperoleh peneliti terkait SOP (*Standard Operating Prosedures*) untuk gerakan PKK ataupun program-program PKK desa, pada intinya sudah baik, namun perlu adanya pengawasan terhadap para pelaksana SOP dilapangan supaya semua prosedur yang berlaku dapat berjalan secara maksimal.

### 3. Koordinasi Berbagai Sumber dan Pengeluaran

Pengertian koordinasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau menyepakati sesuatu, sehingga disatu sisi proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang lainnya. Sementara pada sisi lain yang satu langsung tidak langsung mendukung pihak yang lain. Jika dilihat dari segi normatifnya, maka koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyelaraskan dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda, agar nantinya semua terarah pada penyampaian tujuan tertentu pada waktu yang telah ditetapkan. Dari sudut fungsional, koordinasi dilakukan guna mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja.

Tujuan koordinasi, yang pertama: Untuk menciptakan dan memelihara efektivitas organisasi setinggi mungkin

melalui sinkronisasi, penyerasian, kebersamaan dan keseimbangan antara berbagai kegiatan dependen suatu organisasi; kedua: Untuk mencegah konflik dan menciptakan efisiensi setinggi-tingginya di setiap kegiatan interdependen yang berbeda-beda melalui kesepakatan yang mengikat semua pihak yang bersangkutan; ketiga: Untuk menciptakan dan memelihara iklim dan sikap saling responsif antisipatif di kalangan unit kerja interdependen dan independen yang berbeda-beda, agar keberhasilan unit kerja yang satu tidak dirusak oleh keberhasilan unit kerja yang lainnya, melalui jaringan informasi dan komunikatif efektif.

Dalam mengimplementasikan suatu kegiatan dari Program PKK di Desa Retok pasti terdapat teknik ataupun strategi yang harus dilakukan, oleh TP PKK agar apa yang menjadi tujuan terhadap Program PKK di Desa Retok dapat tercapai. Untuk itu, salah satu strategi yang paling utama dalam menjalankan suatu kebijakan yaitu koordinasi, kemampuan TP PKK dalam mengkoordinasikan tugas-tugasnya untuk setiap rumah tangga akan sangat membantu demi tercapainya kesejahteraan setiap keluarga.

Penelitian ke Desa Retok Kecamatan Kuala Mandor B, peneliti ikut secara langsung pada kegiatan PKK khususnya pokja III, yaitu dibidang pangan, bidang sandang, bidang perumahan dan tatalaksana rumah tangga. Bersama ibu-ibu PKK desa,

peneliti ikut dalam kegiatan peningkatan ketahanan pangan keluarga guna terciptanya sikap dan perilaku masyarakat untuk menerapkan 3B, yaitu Beragam, Bergizi, Berimbang. Penyuluhan yang disampaikan oleh Ketua PKK Kecamatan Kuala Mandor B bersama Ketua PKK Desa Retok untuk seluruh keluarga, dengan memberi/membagikan bibit tanaman sayur maupun biji-bijian yang harus di tanam di setiap pekarangan rumah tangga. TP PKK diajarkan bagaimana cara membuat kebun kolektif yang mudah dan efisien di setiap pekarangan rumah tangga untuk menanam sayur-sayuran dengan harapan hasilnya dapat dinikmati sendiri, juga bisa dijual untuk mendapatkan penghasilan rumah tangga. Penyuluhan untuk memberikan petunjuk maupun pembinaan tentang bagaimana cara berpakaian yang sopan, bersih dan rapi kepada seluruh masyarakat Desa Retok. Kemudian memberikan penyuluhan untuk menumbuh kembangkan kembali program Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa Terpadu (P2LDT), memasyarakatkan rumah sehat layak huni.

Dari penjelasan koordinasi yang telah dikemukakan di atas, disesuaikan dengan salah satu elemen dalam teori Lineberry, peneliti membuat pertanyaan wawancara penelitian kepada Bapak Kepala Desa mengenai koordinasi pada kelompok sasaran serta pembagian tugas diantara badan pelaksana, yaitu:

*“Koordinasi berada pada ketua kelompok dan pembagian tugas sudah terorganisir sesuai bidangnya, yakni ada ketua, sekretaris, bendahara dan anggota”.*

Pada dasarnya informasi sangatlah penting bagi kita semua, khususnya informasi mengenai program PKK di Desa Retok. Dari hasil pengamatan peneliti menanyakan mengenai respon masyarakat terhadap informasi yang diberikan dalam mengupayakan kesejahteraan keluarga, serta sudah sejauhmana pemahaman masyarakat mengenai program PKK, peneliti mewawancarai Ibu Kepala Desa Retok, yaitu:

*“awal-awalnya begitu antusias, tapi setelah itu kembali semula. Soalnya untuk mengubah mindset masyarakat perlu kesabaran dan berkesinambungan.” pemahannya masih kurang. Ini disebabkan oleh latar belakang sosial ekonomi dan pendidikan masyarakat Desa Retok yang masih di bawah rata-rata”.*

Hal senada juga dikatakan oleh ibu Ketua Pokja III Desa Retok, yaitu:

*“Masyarakat disini sudah tahu semua dengan PKK, cuman belum paham benarlah. Cuman tahu gitu-gitu jak. Diajak ngumpul ada yang rajin datang, ada yang kadang datang, kadang ndak.*

Peran Ibu Kepala Desa dan juga Ibu Ketua Pokja III dapat ditunjukkan dari cara untuk menunjang/mengupayakan ketahanan pangan, sandang, perumahan dan tatalaksana rumah tangga di Desa Retok, peneliti

mewawancarai dengan pertanyaan yang sama, yaitu:

*“Kita sudah berusaha memberi peran masyarakat sesuai dengan tupoksinya, terutama pokja III agar merata secara kontinyu memotivasi warga supaya bisa membaca peluang dilingkungan rumahnya masing-masing agar bernilai ekonomis”.* (Ibu Kepala Desa)

*“Mengajak ibu-ibu, tapi tidak dipaksa. Kalau hari ini tidak bisa ikut kegiatannya, kita ajak besok lagi. Soalnya kan ibu-ibu tu ada kerjaan rumah tangganya sendiri. Kalau sudah mau ada lomba biasanya ibu-ibu barulah giat ikut pelatihan-pelatihan misalnya membuat anyaman tikar, penangken nyiruk, bakul, karna itu kebutuhan petani untuk musim panen sangat diperlukan, dan ini juga bisa di pameran pada saat perlombaan yang diadakan didesa”.* (Ibu Ketua Pokja III)

Strategi juga perlu diterapkan bagi program PKK di setiap pokja-pokja, namun penelitian ini dikhususkan pada pokja III, dengan memberdayakan semua masyarakat yang telah masuk dalam kelompok dasawisma agar dapat terlaksana dengan baik. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Ketua Pokja III, yaitu:

*“Strateginya tentu dengan memberi motivasi yang berkesinambungan dan aksi yang nyata dari para pengurus”.*

Berdasarkan hasil wawancara ini dapat disimpulkan bahwa koordinasi berbagai sumber dan pengeluaran pada

program PKK di Desa Retok Kecamatan Kuala Mandor B, khususnya pada pokja III sudah cukup baik dalam interaksinya kemasyarakat. Dalam segala upaya untuk meningkatkan kesejahteraan setiap keluarga, dilakukan agar menjadikan kesejahteraan keluarga sebagai tujuan utama yang wajib ditingkatkan khususnya bagi semua masyarakat Desa Retok dengan memperbaiki permasalahan yang ada dilapangan.

#### **4. Pengalokasian Sumber-Sumber**

Dalam mengimplementasikan kebijakan publik, menyangkut tentang Program PKK, yang dianggap paling penting dalam proses implementasi kebijakan publik terletak pada bagaimana sumber-sumber yang ada dapat dialokasikan dan didistribusikan dengan adil. Untuk itu pada elemen ini, control dan didistribusikan dengan adil. Untuk itu pada elemen ini, kontrol harus dilaksanakan dengan ketat, karena pada tahap ini seringkali terjadi pelanggaran, terutama dilakukan oleh *implementing agent* dengan korupsi sumber-sumber yang tersedia atas sebuah program pembangunan yang merupakan produk kebijakan publik dari pemerintah.

Sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya tidak selalu bersifat fisik, tetapi juga non-fisik (*intangibile*). Ada empat tipe sumber daya yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu sumber daya

keuangan, sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya teknologi.

Ketersediaan sumber daya akan menjadikan pencapaian tujuan dapat dilaksanakan. Setidaknya, keberadaan sumber daya dalam segala wujud yang diperlukan di desa untuk menerapkan suatu *alternative* strategi pada proses kegiatan program PKK di Desa Retok haruslah menjadi pertimbangan yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Alokasi sumber daya yang efektif tidak menjamin implementasi strategi yang sukses karena program, personel, kontrol dan komitmen harus terserap dalam sumber daya yang disediakan. Berkaitan alokasi sumber daya, para perancang strategi memiliki wewenang untuk menentukan bagian-bagian tiap divisi. Permasalahan sumber daya menjadi sangat penting karena mampu menunjang atau bahkan menghambat proses pelaksanaan strategi serta pencapaian tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Untuk itu, peneliti mewawancarai Ibu Kepala Desa, melihat bahwa masih ada masyarakat yang enggan (belum berminat) untuk mengikuti kegiatan PKK di Desa Retok, dikarenakan masyarakat masih berkuat dengan ekonomi rumah tangga masing-masing, sebab mata pencaharian masyarakat Desa Retok adalah petani dan pekebun dan mayoritas masih dibawah garis kemiskinan.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Desa Retok Kecamatan Kuala Mandor B, peneliti mewawancarai ibu

Kepala Desa mengenai bantuan yang diberikan dari pemerintah atau lembaga lain untuk membantu memenuhi kebutuhan yang diperlukan pernah diperoleh, serta sumber-sumber yang ada dapat dialokasikan dan didistribusikan dengan adil:

*“Bantuan yang diperoleh pernah dari dinas pertanian dan peternakan, selanjutnya bergantung dari APBD (dari desa)”. Serta sumber dana yang rutin APBD penyalurannya melalui PKK dusun bersinergi dengan PKK RT”.*

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Ibu Kepala Desa dan Ibu Ketua Pokja III, terhadap proses pelaksanaan Program PKK di Desa Retok Kecamatan Kuala Mandor B ini adalah adanya kendala saat ingin melaksanakan kegiatan PKK kepada ibu-ibu rumah tangga, baik dari segi waktu, urusan pribadi dan bantuan mengenai pengalokasian sumber-sumbernya untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Kenyataannya, masih ada masyarakat yang enggan untuk ikut serta dalam kegiatan PKK desa ini, karena kendala-kendala yang nyata dilapangan. Berbagai sumber yang dibutuhkan untuk keberlangsungan program PKK khususnya pada pokja III ini dapat berjalan ialah perlu adanya sumber daya manusia yang mau ikut dan bekerjasama dalam berbagai kegiatan PKK yang diadakan di desa agar hasil yang diinginkan untuk kesejahteraan keluarganya dapat terpenuhi dengan mengandalkan hasil alam atau sumber daya alamnya yang ada di Desa

Retok. Kemudian untuk sarana dan prasarana yang dibutuhkan dapat lebih ditingkatkan lagi agar memanfaatkan semua sumber keperluannya dapat digunakan dengan baik.

## E. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya serta memperlihatkan tujuan penelitian yang ingin dicapai untuk mengetahui: Bagaimana proses Implementasi Program PKK dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di Desa Retok Kecamatan Kuala Mandor B, yang dilihat berdasarkan aspek proses implementasi kebijakan publik, dengan mengambil teori dari Lineberry yaitu: (1) Pembentukan unit organisasi atau staff pelaksana; (2) penjabaran tujuan kedalam berbagai aturan pelaksana (*Standard Operating Procedures/SOP*); (3) Koordinasi berbagai sumber dan pengeluaran pada kelompok sasaran serta pembagian tugas diantara badan pelaksana; (4) Pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan. Dari keempat elemen ini dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Pembentukan unit organisasi dalam proses Implementasi Program PKK khususnya pada pokja III di Desa Retok Kecamatan Kuala Mandor B, sudah ada kegiatan yang dibuat dan untuk dikerjakan, namun belum terlaksana

dengan sepenuhnya, sesuai dengan Program PKK yang dilaksanakan. Dengan adanya 10 (sepuluh) Program PKK yang telah dibagi menjadi 4 (empat) kelompok kerja PKK, unit organisasi atau kelompok tersebut menjalankan bidangnya masing-masing dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat.

2. Penjabaran tujuan (*Standard Operating Procedures/SOP*) pada Program PKK di Desa Retok Kecamatan Kuala Mandor B, khususnya dalam pokja III yang mencakup: 1). Bidang pangan, yaitu ketahanan pangan keluarga yang Beragam, Bergizi dan Berimbang (3B), yang aman dan berbasis sumber daya local; 2). Bidang sandang, yaitu memberikan petunjuk maupun pembinaan tentang bagaimana cara berpakaian yang sopan, bersih dan rapi, (berbusana sesuai dengan moral budaya Indonesia); 3). Bidang perumahan dan tatalaksana rumah tangga, yaitu menumbuhkembangkan kembali Program Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa Terpadu (P2LDT), Memasyarakatkan Rumah Sehat dan Layak Huni.

3. Koordinasi berbagai sumber dan pengeluaran terkait pada pelaksanaan dari ke 10 (sepuluh) Program PKK yang dibagi menjadi 4 (empat) kelompok kerja (pokja) khususnya pada pokja III di bidang sandang, pangan, perumahan dan

tatalaksana rumah tangga yaitu koordinasi dari berbagai sumber yang ada mempunyai kewenangan untuk menggerakkan, menyelaraskan, menyetarakan dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan PKK khususnya di pokja III yang spesifik atau berbeda, agar nantinya semua terarah untuk pencapaian tujuan pelaksanaan Program PKK di Desa Retok Kecamatan Kuala Mandor B.

4. Pengalokasian sumber-sumber pada Program PKK di Desa Retok Kecamatan Kuala Mandor B, dimulai dari sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya modal serta sarana dan prasarana yang cukup baik, namun implementasi dilapangan dirasakan masih kurang optimal dan memerlukan bantuan uang bisa digunakan dan dimanfaatkan dengan baik.

## F. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka sebagai solusinya mengemukakan saran-saran sebagai berikut;

1. Pembentukan unit organisasi: - Sudah seharusnya program PKK di Desa Retok Kecamatan Kuala Mandor B dapat mengimplementasikan 10 Program PKK yang telah dibagi kedalam 4 kelompok kerja khususnya pada pokja III, sebagai salah satu upaya untuk mensejahterakan keluarga.

2. Penjabaran tujuan kedalam berbagai aturan pelaksana (*Standard Operating System/SOP*): - Meningkatkan proses Implementasi Program PKK di Desa Retok Kecamatan Kuala Mandor B harus jelas dan sesuai dengan tujuan yang ada atau yang telah ditetapkan.

3. Koordinasi berbagai sumber dan pengeluaran pada kelompok sasaran serta pembagian tugas diantara badan pelaksana: - Pada pelaksanaannya sangat membutuhkan kerjasama antar badan/kelompok sasaran yang berkoordinasi di desa dan agar pelaksanaan Program PKK di Desa Retok Kecamatan Kuala Mandor B dapat berjalan sesuai dengan harapan, yaitu untuk mensejahterakan keluarga.

4. Pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan: - Dapat di sesuaikan dengan keperluan atau situasi keadaan desanya dan harus tepat sasaran, agar apa yang dibutuhkan dan diharapkan dapat diterapkan dengan seharusnya dan semestinya di Desa Retok Kecamatan Kuala Mandor B.

## G. REFERENSI

Buku-buku:

Abdulah Wahab, Solichin. 1990. *Pengantar Kebijakan dari Reformasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara.

Abdulah Wahab, Solichin. 2014. *Analisis Kebijakan, dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan publik*. Cetakan Kedua. Jakarta: Bumi Aksara.

Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Awang, Azam. 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa, Studi Kajian Pemberdayaan Berdasarkan Kearifan Lokal di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Jones, Charles O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)* Terjemahan Ricky Ismanto, Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada.

Nugroho, Riant. 2014. *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Pasolong, Harbani. 2014. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Soekanto, Soerjono. 2004. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.

Soetomo. 2011. *Pemberdayaan Masyarakat, Mungkinkah Muncul Antitesisnya?*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Subarsono, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.

Patilima, Hamid. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Putra, Fadillah. 2003. *Partai Politik dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Ronni, Yosef. 2015. *Profil Desa Retok Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015*.

Tachjan. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: TRUENORTH.

Widodo, Joko. 2008. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.

Widodo, Joko. 2012. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI  
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : ABIGAIL ROTUA MEIRODA SIBARANI  
 NIM / Periode lulus : E21112001  
 Tanggal Lulus : 26 Januari 2017  
 Fakultas/ Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
 Program Studi : ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
 E-mail address/ HP : Abigailsibarani@gmail.com / 0895345156281

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa (**ABIGAIL R.M. SIBARANI**) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul\*\*):

Implementasi Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Desa Retok Kecamatan Kuala Mandor B.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

Secara *fulltext*

*content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Menyatakan pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/ Menyetujui  
 Pengelola Jurnal

Dibuat di : Pontianak  
 Pada tanggal : 23 Maret 2017



**Dr. Pardi, M.A.B**  
 197209052002121003

**Abigail Rotua Meiroda Sibarani**  
 NIM. E21112001

Catatan :

\*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing  
 (Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)